

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1/1NSTR / 7019

TENTANG

PENCEGAHAN POTENSI KONFLIK SOSIAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Dalam rangka menjaga situasi keamanan, ketenteraman, ketertiban dan kedamaian di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memenuhi hak-hak asasi Masyarakat, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk :

KESATU : Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka

mewujudkan kebebasan beragama dan beribadat menurut

agama dan keyakinannya, memilih pendidikan dan

pengajaran, memilih pekerjaan dan bertempat tinggal.

KEDUA : Melakukan upaya-upaya pencegahan praktik diskriminasi

dan menjunjung tinggi sikap saling menghormati serta

menjaga kerukunan hidup beragama dan aliran

kepercayaan.

KETIGA : Melakukan upaya-upaya pencegahan dengan merespon

secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam

masyarakat yang berpotensi menimbulkan intoleran

dan/atau potensi konflik sosial, guna mencegah lebih dini

tindak kekerasan.

KEEMPAT : Meningkatkan efektivitas pencegahan potensi intoleran

dan/atau potensi konflik sosial, secara terpadu, sesuai

tugas, fungsi, dan kewenangan masing masing

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Mengambil langkah-langkah cepat, tepat, tegas, dan proporsional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia untuk menghentikan segala bentuk tindak kekerasan akibat intoleran dan/atau potensi konflik sosial.

KEENAM

: Menyelesaikan berbagai permasalahan yang disebabkan oleh Suku, Agama, Ras, Antar Golongan (SARA) dan politik yang timbul dalam masyarakat dengan menguraikan dan menuntaskan akar masalahnya.

KETUJUH

Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 Tentang Penanganan Konflik Sosial, kepada Organisasi Perangkat Daerah, Kepala Desa sampai dengan masyarakat di lingkungan Kabupaten/Kota.

KEDELAPAN

: Segala bentuk keputusan/kebijakan agar disesuaikan dengan Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal Y RPRIL 2019

GUBERNUR

AH STIMEWA YOGYAKARTA,

AMENGKU BUWONO X